

Potensi Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Lampung

¹ Halvis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila, Indonesia)

² Zulfa Emalia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila), Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 25 Februari 2019

Revision: 16 April 2019

Accepted: 30 April 2019

Kata Kunci:

Indeks Theil, LQ Dinamis, LQ Statis, SWOT, Tipologi Klassen

Abstract

This study aims to identify districts/cities that fall into the category of disadvantaged and analyze the level of regional inequality in Lampung Province. Another objective of this research is to identify sectors that are the basis of economies in regions that are included in the lagging category and identify appropriate policy strategies to develop industries that are economic bases in areas that are included in lagging types. The results showed that there were six districts included in the lagging category: West Lampung Regency, North Lampung, Pesawaran, Pesisir Barat, West Tuba, and Waykanan. The level of inequality in Lampung Province is in a low category, with the average theil index in 2011-2016 of 0.107. The economic base sector in most of the lagging regions in Lampung Province in the agriculture sector. After analyzing sector development, the most suitable strategy for developing the agricultural industry in Lampung Province is an aggressive strategy that focuses on opportunity and strength.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kabupaten / kota yang masuk dalam kategori kurang beruntung, dan menganalisis tingkat ketimpangan regional di Provinsi Lampung. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi basis ekonomi di daerah yang termasuk dalam kategori lagging, dan mengidentifikasi strategi kebijakan yang tepat untuk mengembangkan sektor-sektor yang merupakan basis ekonomi di daerah yang termasuk dalam kategori lagging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada enam kabupaten yang termasuk dalam kategori lagging, yaitu, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Pesisir Barat, Tuba Barat, dan Waykanan. Tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung termasuk dalam kategori rendah dengan indeks rata-rata tahun 2011-2016 sebesar 0,107. Sektor basis ekonomi di sebagian besar berada di daerah tertinggal di Provinsi Lampung adalah sektor pertanian. Setelah dilakukan analisis pengembangan sektor, strategi yang paling cocok untuk mengembangkan sektor pertanian di Provinsi Lampung adalah strategi Agresif yang berfokus pada peluang dan kekuatan.

* Corresponding Author.

Zulfa Emalia, e-mail: emalia.zulfa@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah (Farid dalam Sultan, 2010). Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan dalam penambahan output barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Todaro, 2006).

Salah satu cara yang digunakan untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Melalui data PDRB, dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan peranan masing-masing sektor ekonomi yang menyokong perekonomian suatu daerah. Selain itu, berdasarkan data ini pula pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang terkait dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, dalam data ini memperlihatkan sektor-sektor ekonomi apa saja yang dapat diprioritaskan pembangunannya untuk dijadikan sebagai sektor unggulan (Arsyad, 1997).

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan, hal tersebut menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah. Banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mempunyai pertumbuhan lebih dari 7 persen pertahun, tetapi tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi (Deininger dan Olinto, 2000). Indonesia merupakan salah satu dari negara sedang berkembang yang mengalami masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan dan angka kemiskinan yang cukup tinggi, berikut ini data rata-rata rasio gini berdasarkan pulau di Indonesia.

Tabel 1.
Rasio Gini Per Pulau di Indonesia tahun 2011-2016 (Persen)

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
Maluku	0,373	0,361	0,344	0,338	0,310	0,317	0,339
Sumatera	0,342	0,352	0,358	0,347	0,350	0,338	0,344
Nusa Tenggara	0,364	0,352	0,358	0,366	0,354	0,348	0,361
Bali	0,407	0,431	0,403	0,415	0,377	0,366	0,395
Sulawesi	0,397	0,399	0,412	0,399	0,391	0,393	0,398
Jawa	0,402	0,399	0,406	0,401	0,413	0,401	0,399
Papua	0,418	0,432	0,437	0,424	0,431	0,382	0,417
Indonesia	0,410	0,410	0,413	0,406	0,408	0,397	0,403

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun (BPS), 2011-2016

dengan rata-rata rasio gini lebih dari 3 persen menunjukkan bahwa masalah ketimpangan di Indonesia masih tergolong tinggi. Rata-rata rasio gini di Indonesia tahun 2011 hingga 2016 sebesar 0,403 persen. Rasio gini Pulau Papua lebih besar angkanya dibandingkan rasio gini nasional, dengan rata-rata rasio gini sebesar 0,417 persen dan lebih besar dari rata-rata nasional yang hanya sebesar 0,403 persen hal ini mengindikasikan bahwa di Pulau Papua masih terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini diperkirakan terjadi karena terdapat ketimpangan pembangunan di Pulau Papua serta rendahnya kegiatan industri yang mendukung kegiatan perekonomian sehingga menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Rasio gini Pulau Maluku dan Pulau Sumatera tidak pernah menyentuh angka 4 persen selama tahun 2011 hingga 2016, hal ini menunjukkan bahwa Pulau Pulau Maluku dan Sumatera

tingkat ketimpangannya lebih rendah dibanding tingkat ketimpangan nasional. Pergerakan rasio gini di Pulau Sumatera cenderung menurun diperkirakan hal ini terjadi karena distribusi penduduk serta penda-patan perkapita yang tergolong rendah, sehingga meningkatkan angka rasio gini. Berikut data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 (persen) dan rasio gini menurut provinsi di Pulau Sumatra tahun 2011, 2013, 2016 dibawah ini.

Tabel 2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Rasio Gini Menurut Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2011, 2013, 2016.

Wilayah	Pertumbuhan ekonomi			rata-rata	Rasio Gini			rata-rata
	2011	2013	2016		2011	2013	2016	
Aceh	3,28	2,61	3,31	2,31	0,33	0,34	0,33	0,33
Sumatera Utara	6,66	6,07	5,18	5,78	0,35	0,35	0,32	0,33
Sumatera Barat	6,34	6,08	5,26	5,90	0,35	0,36	0,33	0,35
Riau	5,57	2,48	2,23	2,83	0,36	0,37	0,35	0,37
Jambi	7,86	6,84	4,37	6,28	0,34	0,35	0,35	0,35
Sumatera Selatan	6,36	5,31	5,03	5,46	0,34	0,38	0,35	0,37
Bengkulu	6,85	6,07	5,3	5,94	0,36	0,39	0,36	0,36
Lampung	6,56	5,77	5,15	5,69	0,37	0,36	0,36	0,36
Kep. Bangka Belitung	6,9	5,2	4,11	5,08	0,30	0,31	0,28	0,29
Kep. Riau	6,96	7,21	5,03	6,57	0,32	0,36	0,35	0,36
Pulau Sumatera	6,33	5,36	4,50	5,18	0,34	0,36	0,34	0,35

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2011-2016

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sampai 2016 di Pulau Sumatera adalah sebesar 5,18 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh cenderung turun pada tahun 2011,2013, dan 2016, dengan rata-rata angka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,31 persen Aceh menjadi provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Sumatera. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh tidak diikuti dengan tingginya rata-rata rasio gini di Provinsi Aceh, hal ini diperkirakan terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, minimnya sumber daya ekonomi, namun jumlah sumber daya tersebar secara merata sehingga menyebabkan rasio gini Provinsi Aceh rendah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2011 hingga 2016 sebesar 6,57 persen dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau masih lebih tinggi, dan rata-rata rasio gini sebesar 0,36 persen masih lebih rendah dari rata-rata rasio gini Pulau Sumatera. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena jumlah penduduk yang sedikit dan pendapatan perkapita yang tinggi sehingga ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011 hingga 2016 sebesar 5,69 persen dimana angka ini lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera yang hanya sebesar 5,18 persen. Namun hal ini tidak diiringi dengan rendahnya rasio gini Provinsi Lampung yang lebih besar dari rata-rata rasio gini Pulau Sumatera. Diperkirakan hal ini terjadi karena jumlah sumber daya yang memadai namun sumber daya tersebut hanya tersebar di daerah-daerah tertentu dan jumlah penduduk yang tergolong padat sehingga mengakibatkan tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan rendahnya angka ketimpangan.

Provinsi Lampung adalah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, Ibukota Provinsi Lampung terletak di kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 Kota dan 13 Kabupaten, Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah sebanyak 8.117.268 jiwa, salah satu misi Provinsi Lampung tahun 2014-2019 adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, namun

masalah ketimpangan tetap menjadi permasalahan klasik yang dihadapi provinsi ini. Hal ini dapat diidentifikasi melalui jumlah pendapatan regional dari masing-masing kabupaten/kota yang ada (Tabel 1.3). Ketidakmerataan distribusi pendapatan biasanya disebabkan oleh pengembangan sektor atau komoditas unggulan yang tidak tepat hal ini dapat kita lihat pada tabel laju pertumbuhan PDRB sektoral di Provinsi Lampung tahun 2010-2016.

Tabel 3.
Laju pertumbuhan PDRB sektoral di Provinsi Lampung Tahun 2010-2016 (persen).

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Pertanian dan Perikanan	5,38	3,93	4,63	3,42	3,66	3,16	4,03
Pertambangan	9,75	5,61	11,47	0,93	4,2	4,36	6,05
Industri Pengolahan	4,97	9,32	7,74	4,51	7,48	3,89	6,32
Pengadaan Listrik dan Gas	8,43	15,15	10,83	9,82	3,6	22,49	11,72
Konstruksi	5,74	6,44	3,58	7,7	2,29	8,53	5,71
Perdagangan	7,54	5,24	2,97	5,98	1,98	6,65	5,06
Transportasi	8,2	10,35	7,35	7,65	11,67	7,87	8,85
Informasi dan Komunikasi	12,34	13,38	9,37	8,84	10,84	10,63	10,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	11,7	6,74	1,53	3,56	8,02	7,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2010-2016(diolah).

Berdasarkan Tabel 3 dapat diidentifikasi bahwa pergerakan pertumbuhan PDRB sektoral cenderung fluktuatif, sektor dengan angka pertumbuhan terbesar terdapat pada sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2011 hingga 2016 sebesar 11,72 persen, dan informasi dan komunikasi menjadi sektor ke dua dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, sedangkan sektor pertanian dan perikanan memiliki angka pertumbuhan terendah dibanding sektor lainnya, pergerakan pertumbuhan PDRB sektoral yang cenderung fluktuatif mengindikasikan tidak adanya konsistensi pengembangan sektor yang menjadi basis ekonomi.

Sektor basis adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun luar daerah. Secara tidak langsung daerah mempunyai kemampuan untuk mengeksport barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain dengan kata lain sektor basis merupakan sektor yang menjadi tumpuan orang banyak. Sektor potensial adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang memiliki prospek dan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk dikembangkan, dan sektor unggulan menurut adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar (Tambunan, 2001). Maka perlu dianalisa sektor dan subsektor PDRB selama kurun waktu tertentu dan waktu tertentu guna mengetahui sektor atau subsektor yang dianggap menjadi sektor basis untuk dikembangkan. Penguatan sektor yang menjadi sektor basis di daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal dapat diidentifikasi melalui kontribusi kontribusi dari kabupaten terhadap PDRB provinsi data dibawah ini menyajikan data pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota, tahun 2011- 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung dan daerah-daerah mana saja yang ada di Provinsi Lampung ini yang masuk ke dalam daerah tertinggal serta mengidentifikasi sektor apa yang bisa dikembangkan serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kebijakan pengembangan sektor potensial yang akan di analisis menggunakan metode SWOT dengan keunggulan analisis SWOT dapat dipakai untuk memprediksi masa depan, dapat dipakai membangun untuk konsensus berdasarkan kebutuhan dan keinginan, cocok dengan teknik lain antara lain Time Series maupun AHP, serta bersifat multiguna dan sederhana.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan untuk menganalisis pengembangan potensi ekonomi lokal daerah tertinggal sebagai upaya mengatasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung adalah data sekunder berupa PDRB tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung atas harga konstan tahun 2011-2016, PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga konstan pada tahun yang sama dan data jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan kabupaten/kota data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan sumber lainnya, serta data primer yang diperoleh melalui kuisisioner SWOT.

1. Indeks Analisis Tipologi Klassen

Indeks ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klassen dalam penelitian kali ini adalah Daerah tipe I cepat-maju dan cepat-tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Lampung. Daerah tipe II maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung. Daerah tipe III berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung. Daerah tipe IV relatif tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung.

2. Indeks Entropi Theil

Theil Index sebagaimana digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi di daerah. Data yang digunakan dalam indeks Theil ini sama halnya dengan data yang digunakan dalam indeks Williamson. Semakin besar indeks theil artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 atau semakin kecil artinya sangat merata. Diduga bahwa daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal menyumbang tingkat ketimpangan yang besar terhadap ketimpangan yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Formulasi Theil index (T_d) adalah sebagai berikut (Akita, 2003):

$$T = \sum_j \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_i$$

Keterangan:

T = Indeks Theil;

Y = Jumlah Seluruh PDRB Perkapita Provinsi;

Y_i = PDRB Perkapita Provinsi;

Y_{ij} = Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi;

N = Jumlah Penduduk Provinsi;

N_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota ;

3. Analisis Location Quotient (LQ)

Location Quotient (kuosien lokasi) digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang menjadi basis ekonomi dan layak untuk dikembangkan. Teknik LQ dapat dibedakan menjadi dua, yaitu LQ statis (*Static Location Quotient, SLQ*) dan LQ dinamis (*Dynamic Location Quotient, DLQ*). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah LQ statis dan LQ dinamis.

4. SWOT

Alat analisis SWOT untuk mengidentifikasi ketepatan strategi kebijakan yang telah dilakukan Batasan analisis untuk mengidentifikasi ketepatan strategi kebijakan pada penelitian adalah sektor yang bersifat umum dan menjadi sektor basis di sebagian besar kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tertinggal. Responden yang diminta untuk melakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuisisioner SWOT berasal dari akademisi dan pihak yang kompeten membawahi sektor yang termasuk potensial Provinsi Lampung. Jumlah total

responden yang melakukan penilaian kuisisioner sebanyak 10 responden, yang apabila dilihat dari segi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

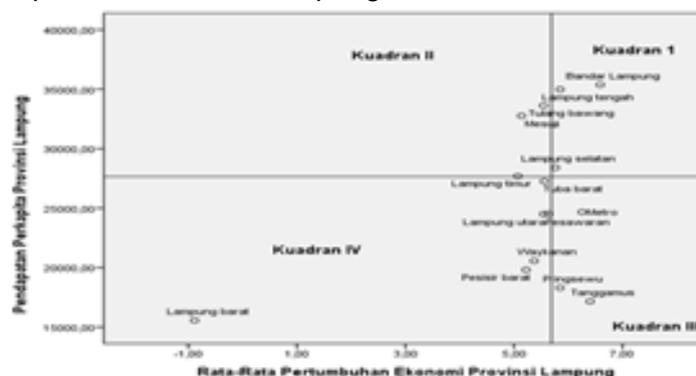
- a. Pendidikan S2 : 2 responden yang merupakan akademisi di bidang pertanian Universitas Lampung.
- b. Pendidikan S1 : 4 responden yang merupakan pejabat dari dinas pertanian Provinsi Lampung
- c. Pendidikan D3/SMA : 4 responden yang terdiri dari pelaku usaha di bidang pertanian di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Identifikasi wilayah berdasarkan kategorinya

Analisis ini dilakukan karena terdapat perbedaan karakter dari masing-masing daerah di Provinsi Lampung, tujuan di klasifikasikannya masing-masing daerah ke masing-masing kategorinya adalah untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sehingga dapat di prioritaskan kebijakannya. Gambar 1 Tipologi Klassen Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2011 -2016.



Sumber : data diolah

Gambar 1. Tipologi Klassen Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2016

Berdasarkan Gambar 1 menyatakan bahwa Daerah kuadran 1 cepat-maju dan cepat-tumbuh, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung ketiga kabupaten dan kota ini masuk dalam kategori kuadran I dengan tipe cepat maju dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Lampung. Ketiga kabupaten ini merupakan daerah yang termasuk kabupaten/kota maju di Provinsi Lampung, berdasarkan kondisi dilapangan Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung dan bisa disebut juga sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung sehingga kegiatan ekonomi di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan lebih unggul di banding daerah lainnya, sedangkan Lampung Selatan merupakan Kabupaten yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera sehingga memungkinkan untuk adanya kemudahan untuk memperoleh konsumen dalam kegiatan ekonominya, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori kuadran I diperkirakan karena jumlah penduduk yang masih belum tergolong padat dan posisi Kabupaten Lampung Tengah yang cukup strategis menyebabkan Kabupaten Lampung Tengah mudah dalam membangun kegiatan ekonominya.

Daerah kuadran 2 maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur, Mesuji, dan Tulang Bawang. Tingginya pendapatan perkapita dapat disebabkan karena jumlah penduduk yang masih rendah, dan jumlah sumber daya yang melimpah ke tiga Kabupaten yang masuk dalam kuadran II ini memiliki keduanya sehingga dapat menyebabkan pendapatan perkapita mereka menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Lampung, sedangkan untuk rendahnya pertumbuhan ekonomi salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya pemanfaatan teknologi yang masih

minim kabupaten yang masuk dalam kuadran II ini berdasarkan kondisi dilapangan masih mengandalkan sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar warganya, namun pengembangan teknologi di sektor pertanian hingga saat ini masih dibilang minim sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian.

Daerah Kuadran III berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung adalah Kabupaten Tanggamus, Pringsewu dan Kota Metro. Daerah ini merupakan daerah yang dekat dengan ibukota Provinsi Lampung sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga daerah ini merupakan daerah penunjang kegiatan ekonomi di pusat kegiatan ekonomi, selain itu tingginya tingkat pertumbuhan di kabupaten ini diperkirakan terjadi karena tingginya daya beli masyarakat dan jumlah sumber daya alam yang memadai hal ini tercermin dari banyaknya destinasi wisata yang terdapat di ketiga daerah ini, rendahnya pendapatan perkapita di daerah ini diperkirakan terjadi akibat masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di wilayah tertentu saja, sehingga pendapatan masyarakat di daerah ini tidak dapat terdistribusi secara merata.

Daerah Kuadran IV tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung adalah kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Pesisir Barat, Tuba Barat, Way Kanan. Daerah ini masuk dalam kategori kuadran IV

Tabel 4.
Indeks Theil Provinsi Lampung

Tahun	Indeks Theil	Pertumbuhan (%)
2011	0,0849	-
2012	0,0927	9,15
2013	0,1008	8,77
2014	0,1130	12,06
2015	0,1217	7,70
2016	0,1339	10,08
rata-rata	0,1078	9,55

Sumber : data diolah

Diperkirakan karena diantara daerah ini sebagian besar merupakan daerah daerah otonomi baru (DOB) sehingga fasilitas dan sarana pendukung kegiatan ekonomi masih dapat dikatakan minim di daerah ini selain itu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tidak memadai sehingga jumlah pengangguran di daerah ini masih tergolong tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan dan pendapatan perkapita, hal-hal ini tercermin dari minimnya jumlah industri dan fasilitas pendidikan yang terdapat di kabupaten yang tergolong dalam kategori kuadran IV di Provinsi Lampung.

Analisis Tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung tahun 2011-2016

Hasil analisis indeks theil yang menganalisis ketimpangan di Provinsi Lampung tahun 2011 hingga 2016. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan data indeks theil di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung diduga karena masih tidak seimbang pertumbuhannya penduduk dan pendapatan perkapita di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, hal ini dapat dilihat dari kondisi yang terjadi di Provinsi Lampung dimana perbedaan tingkat pendapatan perkapita dan jumlah penduduk di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang timpang.

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung angka pertumbuhan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata di Provinsi Lampung namun jumlah penduduknya cenderung menurun, sehingga perbandingannya dengan di tingkat provinsi menjadi rendah. Dilain pihak

terdapat kabupaten/kota yang pertumbuhan pendapatan perkapitanya rendah namun jumlah penduduknya termasuk tinggi sehingga perbandingannya jumlahnya dengan di tingkat provinsi menjadi besar.

Hasil penghitungan indeks Theil menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan di Provinsi Lampung dengan rata-rata tingkat ketimpangan sebesar 0,107. Ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung menyebabkan sulitnya pemerataan distribusi pembangunan hal ini diperkirakan terjadi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Lampung yang masih belum tepat dalam membangun daerahnya, kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Lampung baik di daerah yang termasuk dalam kategori maju ataupun di daerah yang tergolong tertinggal diperkirakan masih belum tepat, sehingga angka ketimpangan di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan masalah tersebut maka perlu dilakukan pemerataan pembangunan ekonomi melalui peningkatan sektor yang menjadi basis ekonomi di daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal agar dapat mengimbangi pembangunan ekonomi di daerah yang sudah termasuk dalam kategori maju.

Analisis sektor basis di Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Lampung.

Tabel 5.
Rata-Rata LQ Statis di Kabupaten yang Termasuk dalam Kategori Tertinggal Tahun 2011-2016.

Sektor PDRB	Lampung Barat	Lampung Utara	Pesawaran	Pesisir Barat	Waykanan	Tuba Barat
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,638	1,272	1,363	1,635	1,165	1,162
B. Pertambangan dan Penggalian	0,363	0,556	0,185	0,870	0,689	0,076
C. Industri Pengolahan	0,219	0,641	0,781	0,294	1,155	1,478
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,111	0,967	0,659	0,065	1,213	3,048
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,984	0,615	0,582	0,545	0,534	0,975
F. Konstruksi	0,417	0,854	1,083	0,559	0,947	0,963
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,079	1,091	1,237	1,010	0,908	1,032
H. Transportasi dan Pergudangan	0,476	1,074	0,498	0,194	0,523	0,165
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,693	0,729	0,702	1,055	0,487	0,547

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat dari enam kabupaten yang termasuk dalam kategori tertinggal sektor yang menjadi basis ekonominya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Lampung Barat dengan nilai LQ Statis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,638 adalah rata-rata sektor dengan kebasisan ekonomi yang paling besar selanjutnya adalah sektor real estate dengan nilai rata-rata 1,607 Kabupaten Lampung Barat memang terkenal dengan produk-produk hasil pertaniannya terutama kopi sehingga menjadikan sektor

pertanian di Kabupaten Lampung Barat sebagai sektor basis ekonominya. Kabupaten Lampung Utara dengan dengan rata-rata nilai LQ Statis sektor informasi dan komunikasi sebesar 1,274 menjadikan sektor ini sebagai sektor dengan kebasisin terbesar di banding sektor lainnya di Kabupaten Lampung Utara, meskipun selisihnya dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sangatlah tipis. Berdasarkan kondisi di wilayah ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Lampung Utara memang masih mengandalkan pertanian dalam mata pencahariannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lampung Utara jumlah lahan di Kabupaten Lampung Utara total luas lahan sawahnya sebesar 19.304 Ha, terdiri dari 12.627 lahan sawah irigasi dan 6.677 lahan sawah non irigasi Luas area kebun sebesar 86.393 Ha dan lahan sementara tidak diusahakan seluas 826 Ha dan jumlah perusahaan pertanian sebanyak 6 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.400 pekerja, namun untuk jumlah penyedia layanan komunikasi dan informasi dapat dikatakan memiliki jumlah yang cukup banyak. Sehingga sektor ini dapat melayani kebutuhan pasar di dalam dan luar daerah Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten Pesawaran memiliki nilai LQ statis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,363 selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Pesawaran adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor ini menempati urutan kedua sebagai sektor basis ekonomi di Kabupaten Pesawaran dan memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di kabupaten lainnya, sebagian besar masyarakat di Kabupaten ini memang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian masyarakatnya, hal ini dapat dibuktikan dari luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 13.121 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 104.256 Ha merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat memiliki sektor basis yang sama dengan Kabupaten Lampung Barat, dengan nilai kebasisan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,635 Kabupaten Pesisir Barat merupakan pesaing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hampir setara dengan Lampung Barat, dengan Luas lahan pertanian kabupaten Pesisir Barat yang telah dimanfaatkan sebagai lahan sawah seluas 32.407 ha, dan yang belum dimanfaatkan seluas 2.863 ha. lokasi Kabupaten ini dihimpit oleh deretan bukit barisan dan merupakan daerah dataran rendah sehingga menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang cocok untuk bercocok tanam.

Sektor yang menjadi basis ekonomi di kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata nilai LQ statis tahun 2011 hingga 2016 sebesar 3,048492, kemudian disusul dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata nilai LQ statis tahun 2011 hingga 2016 sebesar 1,162416 sektor ini menjadi sektor yang potensial di Kabupaten Tulang Bawang barat dikarenakan masih banyaknya permintaan terhadap pasokan listrik dan gas di kabupaten ini sehingga pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 50 unit pada tahun 2015 di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat guna memenuhi permintaan akan pasokan listrik di daerah ini.

Sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Waykanan adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata nilai LQ statis tahun 2011 hingga 2016 sebesar 1,212542, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata nilai LQ sebesar 1,16501 berdasarkan kondisi di Kabupaten Waykanan masih banyak daerah yang belum memiliki pasokan listrik sehingga permintaan terhadap pasokan listrik dan gas cukup tinggi dari total jumlah kepala keluarga sebanyak 107.783 KK, 29.747 KK masih belum mendapat pasokan listrik sehingga untuk memenuhi pasokan listrik ini banyak pembangkit listrik tenaga air yang dibuat di beberapa sungai di Kabupaten Waykanan.

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui bahwa sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten yang termasuk dalam kategori tertinggal adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Daerah yang masih tergolong dalam kategoritertinggal ini harus lebih intensif dalam mengembangkan sektor yang menjadi basis ekonominya masing-masing, namun analisis LQ statis ini bersifat statis yang artinya hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu saja, maka untuk memperkuat analisis akan di lengkapi dengan analisis LQ dinamis yang menggunakan laju pertumbuhan nilai PDRB selama kurun waktu 2011 hingga 2016.

Tabel 6.
Rata-Rata LQ Dinamis di Kabupaten yang Termasuk dalam Kategori Tertinggal tahun 2011 hingga 2016.

Sektor PDRB	Lampung Barat	Lampung Utara	Pesawaran	Pesisir Barat	Tuba barat	Waykanan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,015	1,000	0,915	0,904	0,903	0,906
Pertambangan dan Penggalian	0,931	1,012	1,041	1,027	1,024	1,025
Industri Pengolahan	0,931	1,012	0,985	0,973	1,008	0,995
Pengadaan Listrik dan Gas	0,980	0,938	0,939	1,170	0,961	0,928
Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,963	0,996	1,007	0,984	0,995	1,001
Konstruksi	0,927	0,999	0,994	1,036	0,999	0,984
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,936	1,004	1,003	0,999	0,998	1,003
Transportasi dan Pergudangan	0,973	1,005	0,998	1,001	1,002	1,010
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,932	1,006	1,001	1,009	1,001	1,013
Informasi dan Komunikasi	0,951	1,016	0,980	1,004	0,997	0,986
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,925	0,999	0,988	0,973	0,977	0,976
Real Estate	0,940	1,002	0,998	0,989	1,000	1,008
Jasa Perusahaan	0,950	1,007	1,005	0,975	1,007	0,989
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,946	0,997	0,997	0,991	1,002	1,003
Jasa Pendidikan	0,948	1,013	1,008	1,000	1,005	0,996
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,946	1,003	1,001	0,994	0,999	1,001
Jasa Lainnya	0,949	0,996	1,000	1,017	0,991	0,998

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa enam kabupaten yang termasuk dalam kategori tertinggal sektor yang menjadi perkembangannya lebih cepat dibanding perkembangan pada tingkat provinsi adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan nilai DLQ > 1 di sebagian besar kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tertinggal menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian memiliki potensi sebagai sektor yang dapat menjadi basis ekonomi di masa mendatang.

Kabupaten Lampung Barat dengan rata-rata LQ Dinamis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2011 hingga 2016 sebesar 1,015 yang artinya lebih besar dari 1, dan menjadikan sektor ini memiliki potensi perkembangan yang baik untuk masa mendatang, selain itu hasil analisis LQ Statis dan LQ Dinamis menunjukkan bahwa Sektor yang menjadi basis ekonomi selama kurun waktu 2011 hingga 2016 dan diharapkan pada masa kedepannya dapat diharapkan berkembang baik adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Lampung Barat dimana penduduknya masih banyak yang mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai mata pencaharian, salah satu komoditas yang paling terkenal dari Kabupaten Lampung Barat adalah produk Kopinya.

Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa sektor yang perkembangannya lebih baik dibanding di tingkat Provinsi, namun sektor yang rata-rata nilai DLQnya terbesar adalah sektor

informasi dan komunikasi, dengan nilai sebesar 1,016 yang artinya sektor ini pada tahun 2011 hingga 2016 memiliki perkembangan yang lebih baik pada tingkat kabupaten dibanding perkembangannya pada tingkat provinsi. Hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi memang memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, selain hasil analisis SLQ menjadikan sektor informasi dan komunikasi sebagai sektor dengan kebasisan terbesar di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2011 hingga 2016 hasil analisis DLQ juga mendukung pengembangan sektor informasi dan komunikasi yang memiliki perkembangan lebih baik dibanding perkembangan sektor ini pada tingkat provinsi.

Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa sektor yang tingkat perkembangannya lebih besar dari tingkat perkembangannya pada tingkat provinsi, sektor dengan rata-rata nilai DLQ paling besar di Kabupaten Pesawaran adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai DLQ sebesar 1,041 dan menunjukkan bahwa perkembangan sektor pertambangan dan penggalian di daerah ini sudah lebih baik di banding perkembangan pada tingkat provinsi. Namun untuk sektor yang menjadi basis ekonomi pada tahun 2011 hingga 2016 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan perkembangannya tidak sebaik perkembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di tingkat provinsi.

Kabupaten Pesisir Barat sektor yang perkembangannya lebih besar di banding pada tingkat provinsi dan dibanding sektor lainnya di daerah yang sama adalah sektor pengadaan listrik dan gas, dengan nilai 1,170 yang artinya lebih besar dari satu. Meskipun sektor ini perkembangannya lebih baik dibanding perkembangan sektor yang sama di tingkat provinsi dan sektor lainnya di tingkat kabupaten. Sektor yang menjadi basis ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah dan luar daerah adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan hasil analisis pengadaan listrik dan gas bukanlah sektor yang menjadi basis ekonomi di daerah Pesisir Barat hal ini dapat dilihat dari nilai SLQ sektor pengadaan listrik dan gas yang rata-ratanya tahun 2011 hingga 2016 hanya sebesar 0,065 yang artinya kurang dari 1 dan dapat dikatakan sektor ini belum dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah pesisir barat.

Sektor pada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang perkembangannya lebih baik dibanding perkembangannya di tingkat Provinsi Lampung adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai DLQ sebesar 1,027. Meskipun perkembangan sektor ini sudah lebih baik dibanding perkembangannya di tingkat provinsi namun sektor ini belum bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah Tulang Bawang Barat hal ini dikarenakan hasil analisa SLQ yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2011 hingga 2016 hanya memiliki rata-rata nilai SLQ sebesar 0,076.

Kabupaten Waykanan sektor yang perkembangannya lebih baik dibanding perkembangannya di tingkat provinsi adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai DLQ sebesar 1,025 meskipun sektor ini perkembangan-nya sudah lebih baik disbanding perkembangan sektor ini pada tingkat provinsi, namun pada kurun waktu 2011 hingga 2016 sektor ini belum bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam wilayahnya, sehingga sektor ini belum dapat diprioritaskan pengembangannya.

Hasil analisis LQ Dinamis sangat di pengaruhi dengan tingkat pertumbuhan yang ada sehingga apabila terdapat salah satu penurunan tingkat pertumbuhan yang terlalu rendah di wilayah kabupaten/kota ataupun pada tingkat provinsi menyebabkan hasil analisa tidak sesuai dengan harapan, hasil analisis LQ Statis yang meggunakan perbandingan jumlah PDRB Kabupaten/kota dengan PDRB Provinsi dipilih sebagai acuan pengembangan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten/kota dikarenakan hasil analisis LQ Statis tidak terlalu dipengaruhi penurunan jumlah data yang signifikan, sehingga pengembangan sektor yang menjadi basis ekonomi di daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal dapat dilakukan dengan intensif.

Secara umum sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, merupakan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Lampung, hal ini didukung dengan data peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pembentukan PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Data dibawah ini menunjukkan peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pembentukan PDRB pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2013 hingga 2017.

Identifikasi Kebijakan di Sektor yang Menjadi Basis Ekonomi (SWOT)

Pada penelitian ini sektor yang akan dilakukan analisis ketepatan kebijakannya adalah sektor Pertanian, karena sektor ini bersifat umum dan menjadi sektor basis di sebagian besar kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tertinggal. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang cocok untuk digunakan dalam pengembangan sektor yang menjadi basis ekonomi di daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal.

Tabel 7.
SWOT Sektor Pertanian di Daerah dengan Kategori Tertinggal Provinsi Lampung.

Faktor Internal		TOTAL		
		Bobot	Rating	Bobot x Rating
<i>Kekuatan (Strength/S)</i>				
1	Memiliki potensi sumberdaya yang baik untuk di kembangkan	0,13	7,89	1,03
2	Posisi geografis yang strategis	0,11	7,44	0,79
3	Kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang baik	0,12	6,89	0,82
4	Kemudahan dalam memperoleh peralatan penunjang kegiatan pertanian.	0,13	5,56	0,73
5	Ketersediaan lembaga dan usaha kecil/tradisional pertanian.	0,13	6,11	0,77
6	Adanya dukungan dari pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian	0,13	7,00	0,92
7	Ketersediaan lahan pertanian, pupuk, dan tenaga kerja.	0,12	7,11	0,88
8	Kemudahan dalam memasarkan produk hasil pertanian	0,13	6,00	0,79
Jumlah		1,00		6,73
<i>Kelemahan (Weakness/W)</i>				
1	Status kepemilikan lahan yang masih berstatus sewa.	0,22	5,11	1,11
2	Pencemaran dan degradasi lingkungan akibat penggunaan pupuk dan pestisida.	0,23	4,67	1,07
3	Kondisi cuaca yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk pertanian.	0,20	5,67	1,11
4	Serangan Hama dan penyakit pada tanaman.	0,28	5,33	1,48
Jumlah		1,00		4,76
Faktor Eksternal		TOTAL		
		Bobot	Rating	Bobot x Rating
<i>Peluang (Opportunities/O)</i>				
1	Meningkatnya permintaan hasil olahan pertanian.	0,20	7,22	1,45
2	Kesesuaian harga produk pertanian di pasar	0,20	6,22	1,25
3	Adanya program pemerintah, swasta dan asing yang dalam kegiatan pertanian.	0,20	5,67	1,12
4	Permintaan terhadap produk pertanian yang cukup banyak.	0,22	7,11	1,57
5	Adanya produk hasil olahan yang termasuk potensial	0,18	7,00	1,26
Jumlah		1,00		6,65

Faktor Internal		TOTAL		
		Bobot	Rating	Bobot x Rating
<i>Kekuatan (Strength/S)</i>				
<i>Ancaman (Threats/T)</i>				
1	Perkembangan sektor pertanian di daerah lain	0,28	5,56	1,53
2	Konflik kepentingan antar sektor	0,22	5,89	1,31
3	Persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean	0,27	5,56	1,48
4	Persaingan harga produk hasil olahan yang terjadi di pasar.	0,24	5,44	1,28
Jumlah		1,00		5,60

Dari hasil perhitungan diatas maka Strategi yang dapat dipilih untuk mengembangkan sektor pertanian yang termasuk dalam sektor basis ekonomi adalah strategi S-O atau *Agresive* yaitu dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada dengan sebaik mungkin untuk mendapat tingkat pertumbuhan yang tinggi (*Growth Oriented Strategi*), hasil ini diperoleh berdasarkan skor yang terbesar dari ke-empat strategi lainnya. Strategi ini menggunakan kekuatan internal yang terdapat dari sektor pertanian di Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Lampung untuk memaksimalkan keunggulan dari sektor pertanian di Provinsi Lampung. Implementasi dari kebijakan *Growth Oriented Strategi* sektor pertanian di Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Lampung adalah :

1. Merevitalisasi kebijakan di bidang pertanian di tingkat Provinsi Lampung.
2. Memperluas promosi dan penjualan hasil dari sektor pertanian yang menjadi komoditi ekspor dengan cara menjalin banyak kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
3. Mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok usaha tani yang sudah ada dan menambah jumlah kelompok usaha tani.
4. Menambah jumlah pelaku usaha agroindustri dengan cara memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi.
5. Memperbanyak sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian guna menarik minat investor masuk.
6. Menjaga ketersediaan lahan pertanian, bibit, pupuk dan alat-alat penunjang kegiatan di sektor pertanian lainnya guna menjaga jumlah produksi hasil pertanian.
7. Memberikan subsidi kepada para pelaku usaha tani agar dapat menjaga tingkat pendapatan para petani dari fluktuasi harga komoditi pertanian.
8. Melakukan regulasi dalam pengurusan izin ekspor agar kegiatan eksor produk dapat berjalan dengan mudah dan tidak memakan waktu lama.
9. Memberikan lokasi khusus untuk kegiatan pasar produk pertanian guna mempermudah konsumen mendapatkan produk pertannian yang dibutuhkan.
10. Mempermudah kegiatan distribusi produk pertanian, seperti pemberian sarana transportasi yang dapat mempercepat kegiatan distribusi produk pertanian sehingga kualitas produk pertanian tidak menurun

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat enam Kabupaten yang tergolong dalam kategori tertinggal, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Pesisir Barat, Tuba Barat, Way Kanan.

2. Hasil perhitungan terhadap ketimpangan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung tahun 2011-2016 masih termasuk kategori rendah dengan rata-rata indeks theil tahun 2011-2016 sebesar 0,1078 namun cenderung bergerak naik tiap tahunnya.
3. Hasil analisis sektor yang menjadi basis ekonomi di enam kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tertinggal menunjukkan bahwa :
 - a. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan *real estate* merupakan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Lampung Barat .
 - b. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan jasa pendidikan, jasa kesehatan merupakan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Lampung Utara.
 - c. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan perdagangan besar dan eceran resaparasasi motor dan mobil merupakan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Pesawaran.
 - d. Sektor pertanian dan administrasi pemerintahan merupakan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat.
 - e. Sektor pertanian dan pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Waykanan.
 - f. Sektor pertanian dan pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Hasil identifikasi kebijakan sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kekuatan (*strength*) dan kesempatan (*opportunity*) atau menggunakan strategi *Agresive* yang dimiliki sektor pertanian di kabupaten yang termasuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Lampung merupakan langkah pengambilan keputusan yang terbaik.

Saran

Ketimpangan di Provinsi Lampung masih tergolong rendah namun sejak tahun 2011 hingga 2016 cenderung mengalami kenaikan, untuk mengurangi ketimpangan di Provinsi Lampung perlu dilakukan penguatan ekonomi lokal unuk mengurangi tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung maka perlu dilakukan pengoptimalan pengembangan sektor yang menjadi basis ekonomi di kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Lampung.

Sektor pertanian merupakan sektor yang basis ekonomi di sebagian besar kabupaten yang tergolong dalam kategori tertinggal dan memiliki perkembangan yang cukup baik, sehingga perlu dilakukan penguatan pada sektor pertanian dengan cara merevitalisasi kebijakan di bidang pertanian, memperluas pasar ekspor komoditi pertanian, memperbanyak pelaku agroindustri, menjaga ketersediaan lahan, pupuk, dan sarana prasana lainnya yang menjadi penunjang kegiatan pertanian, dan mempermudah kegiatan distribusi produk pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro. 2003. *Decompising Regional Income Inequality in China and Indonesia using two-stagenested Theil decomposition method*. Jurnal. University of Japan. Japan.
- Arsyad, Lincolin. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Gini Ratio per Provinsi di Indonesia tahun 2010-2016*. Badan pusat statistik Indonesia: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2018. *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2016*. Badan pusat statistik Lampung: Lampung.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2018. *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2015*. Badan pusat statistik Lampung: Lampung.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2018. *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2017*. Badan pusat statistik Lampung: Lampung.

- Badan Pusat Statistik Lampung. 2018. *PDRB Perkapita Perkabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2016*. Badan pusat statistik Lampung: Lampung.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2017. *Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2010, 2014, dan 2015*. Badan pusat statistik Lampung: Lampung.
- Deiningger, Klaus dan Olinto. Pedro. 2000. *Asset Distribution, Inequality And Growth*. Worldbank.
- Sjafrizal, 2012, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jurnal Buletin Prisma. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris*. Cetakan Kedua. Jakarta.
- Todaro, M. 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan*. Jakarta: Penerbit Erlangga